



RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rancangan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 dan disusun dengan mengacu pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan juga dibuat setelah ada pergeseran anggaran akibat efisiensi dan juga usulan penambahan anggaran maupun penyesuaian gaji dan tpp ASN. Pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

Proses penyusunan RENJA ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu secara kontekstual dalam mekanisme perencanaan, secara substantif Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik 2024 mengintegrasikan program Kabupaten Gresik. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik tahun 2026 yang memuat prioritas pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dan secara rinci dijabarkan dalam agenda dan sub agenda pembangunan disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan Trantibum dalam memanifestasikan

kegiatan pembangunan di Gresik. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik berkewajiban menyusun rencana program dan kegiatan APBD.

Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan Tramtibum.

Oleh karena itu, program-program pembangunan Trantibum yang tertuang dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik tahun 2026, menjadi acuan dalam penyusunan KUA PPAS Kabupaten Gresik tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan

evaluasi pembangunan daerah. Permendagri ini juga mengatur tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024.
 12. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025
- Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan yang harus dimiliki oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik adalah:
1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
 2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
 3. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 MAKSUD

Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2026. Hal ini sebagaimana secara yuridis diamanatkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3.2 TUJUAN

Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini nantinya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dan penyusunan RKA, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

- 4.1. Strategi dan Kebijakan
- 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I dan Capaian Renstra.

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik yang dilaksanakan pada Tahun 2026 mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, alokasi anggaran Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2026 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 27.916.506.150,20 dengan rincian Belanja Pegawai 17.321.338.283,20, Belanja Barang dan Jasa 10.514.143.382 dan Belanja Modal 81.024.485. Dengan pagu tersebut, realisasi triwulan I Satuan polisi Pamong Praja sebesar 5.608.252.258,97 atau 20,09%. Dengan sisa anggaran sebesar 22.308.253.891 atau 79,91% yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan II,III dan IV yang berprinsip pada efisiensi dan kehati hatian dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alokasi anggaran belanja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik tahun 2026 dipergunakan untuk pelaksanaan 2 program, 9 kegiatan dan 20 sub kegiatan.

Pada tahun 2026 triwulan I seluruh pelanggaran Perda dan Perbup dapat ditangani, sehingga realisasi kinerja pada indikator persentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tahun 2026 triwulan I mencapai 100%. Pelanggaran Perda dan Perbup Tahun 2026 triwulan I mengalami peningkatan dari triwulan I Tahun 2024 yang sejumlah 121 pelanggaran meningkat menjadi 195 pelanggaran. Dalam rangka penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Dinas Satpol PP telah melakukan upaya-upaya preventif terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kepekaan dan daya tanggap aparat dalam menyerap

permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tahun 2026 triwulan I terjadi 238 gangguan tibus tranmas seperti unjuk rasa dan kegiatan kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat, setiap gangguan maupun kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut dapat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sepenuhnya sehingga tercipta kondisi yang tertib dan kondusif. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat. Telah dibentuk Satuan Tugas Linmas (Satgas Linmas) untuk Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dan Satlinmas di tingkat Desa/Kelurahan. Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT dengan target 1 Linmas per RT sudah terpenuhi, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Tahun 2024 jumlah Linmas 6.595 orang yang tersebar di 5.897 RT. Namun demikian Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Gresik. Pembentukan jejaring kerja Satlinmas belum terwujud dan pembinaan kepada Satlinmas Desa/Satgas Kecamatan masih sangat minim. Sehingga perlu memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang tugas dan fungsi Satuan Linmas, diantaranya : Perbantuan penanggulangan bencana; keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perbantuan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selengkapnya berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 triwulan I Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Peranngkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun(n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun (n-1) 2025 %	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%

1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan OPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang	138 Orang	138 Orang	138 Orang	100%	111 Orang	111 Orang	100%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			260 stel	260 stel	100%	260 stel	260 stel	100%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah fasilitasi administrasi umum OPD	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	6 Jenis	100%
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	45 Paket	45 Paket	100%	9 Paket	9 Paket	100%
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	100%	62 Paket	62 Paket	100%
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1100 Paket	1100 Paket	1650 Paket	1650 Paket	100%	1500 Paket	1500 Paket	100%
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			300 paket	300 paket	100%	11 Paket	11 Paket	100%
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	180 Dokumen	180 Dokumen	100%
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%	100 Laporan	100 Laporan	100%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang pelayanan OPD	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%

1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	100%	36 Rekening	36 Rekening	100%
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	126 orang	126 orang	126 laporan	126 laporan	100%	133 Laporan	133 Laporan	100%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun	1 Tahun	44 Unit	44 Unit	100%	44 Unit	44 Unit	100%
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas yang dibina Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis Persentase Anggota Pamong Praja yang dibina Presentase penyelesaian pelanggaran Perda	5,8% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	450 kali	450 kali	450 kali	450 kali	100%	450 kali	450 kali	100%
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1581 Orang	1581 Orang	100 dokumen	100 dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	69 Orang	69 Orang	75 Orang	75 Orang	100%	750 Orang	750 Orang	100%

1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	335 kali	335 kali	340 Kasus	340 Kasus	100%	135 Kasus	135 Kasus	100%
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda danPerkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	350 Kali	350 Kali	400 Kasus	400 Kasus	100%	38 Laporan	38 Laporan	100%
1.05.02.2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penegaka pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentrman, dan keindahan)	500 kali	500 kali	500 kali	500 kali	100%	500 kali	500 kali	100%
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	300 Laporan	300 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	100%	9 Laporan	9 Laporan	100%
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	190 Kali	190 Kali	550 Laporan	550 Laporan	100%	163 Laporan	163 Laporan	100%
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan PeraturanBupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40 Kali	40 Kali	45 Laporan	45 Laporan	100%	55 Laporan	55 Laporan	100%
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan PPNS	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	1 Kali	100%
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan	2 Kali	2 Kali	3 Laporan	3 Laporan	100%	33 Laporan	33 Laporan	100%

		kapasitas pejabat PPNS penegak perda								
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja digunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan sasaran target sesuai dengan tahun awal Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026 dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gresik

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025 (n)	2026 (n+1)	2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025 (n)	2026 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50%	100 %	100 %	

3.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 2 (dua) indikator sasaran strategis yang diukur, Ke 2 (dua) indikator kinerja sasaran kinerjanya 100% dalam hal ini pencapaian dikategorikan sangat baik.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pusat kawasan ekonomi dan perdagangan di ibu kota Kabupaten Gresik selama ini adalah di ruas jalan Gubernur Suryo, Samanhudi, Usman Sadar dan Sindujoyo, di wilayah tersebut tersedia 2 pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasar Kota dan Pasar Baru), departemen store Ramayana, pusat makanan khas Gresik dan pertokoan, keterbatasan tempat dan fasilitas di dalam pasar maupun area disekitar sentra perdagangan mengakibatkan banyak bermunculan Pedagang kaki lima (PKL), padatnya parkir kendaraan dan angkutan umum menunggu penumpang.

Kondisi demikian yang masih berlanjut adalah jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, bahu jalan dan badan jalan menjadi semakin banyak sehingga menciptakan kawasan Gubernur Suryo sebagai kawasan yang tidak teratur karena badan jalan menyempit oleh PKL, kendaraan parkir dan angkutan umum menunggu penumpang yang berdampak arus lalu lintas macet, sampah tidak terangkut dan kotor.

2.3.3. Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik berada pada misi ke-4 Bupati yaitu Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah. Dengan misi tersebut maka ditetapkan sasaran Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat. Melihat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 yang mencapai 100%, diharapkan dapat meningkatkan capaian program nasional di urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam menegakkan PERDA dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam menegakan PERDA dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan guna membantu mewujudkan Kabupaten Gresik yang tentram dan tertib maka perlu kerja keras terprogram, terukur, berkelanjutan dan terkoordinatif agar dapat menghadapi tantangan - tantangan yang selama ini dihadapi antara lain :

a. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2022 sebanyak 1.291.518 jiwa menghuni area seluas 1.193,76 km² sehingga dapat dihitung ratio

kepadatannya 1.030 jiwa/km². Sedangkan untuk jumlah Polisi Pamong Praja adalah 246 orang, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja seharusnya jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gresik ini idealnya adalah 300 orang. Tetapi itu tidak dijadikan masalah karena semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik mempunyai semangat mengabdikan yang tinggi.

Tingginya kepadatan penduduk menuntut ketersediaan pemukiman dan infrastruktur pendukung seperti jalan, sekolah, sentra perdagangan, fasilitas kesehatan, air bersih, sanitasi dan transportasi umum. Pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban yaitu adanya penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan dan lain - lain.

b. Pertumbuhan Industri

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik terbesar disumbang oleh industri. Perkembangan sektor industri yang demikian besar sangat menguntungkan dari sisi penyerapan tenaga kerja lokal Gresik tetapi juga menjadi magnet bagi calon tenaga kerja luar daerah yang memicu tingginya tingkat urbanisasi ke wilayah Kabupaten Gresik. Selain itu industrialisasi juga menyumbang tingkat polusi yang cukup tinggi baik polusi air, udara maupun tanah. Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan keresahan dalam masyarakat.

Dari tantangan - tantangan yang dihadapi di atas, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peluang - peluang dalam meningkatkan capaian kinerja pelayanan antara lain :

a. Pembangunan fasum fasos

Pembangunan fasum fasos menjadi konsekuensi logis dari pertumbuhan penduduk khususnya di kawasan perkotaan.

Namun pembangunan fasilitas umum maupun fasilitas sosial harus dengan pertimbangan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

b. Koordinasi dengan stakeholders terkait

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak PERDA tidak dapat menyelesaikan permasalahan pelanggaran K3 secara independen, namun harus dengan stakeholders terkait baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Tanpa dukungan stakeholders terkait maka akan terjadi hit and run dalam penegakan PERDA.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010 - 2030 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Menegakan PERDA dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

2.3.5. Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Berdasarkan hasil dari Forum OPD Tahun Anggaran 2024 Satpol PP Kab. Gresik dan pihak terkait agar saling mendukung dan terus mengawal program dan kegiatan tahun 2024 yang telah direncanakan oleh Satpol PP Kab. Gresik agar hasil dan tujuan yang diharapkan khususnya dari Satpol PP dan umumnya dari seluruh warga Kabupaten Gresik bias tercapai. Terutama peran serta Satpol PP dalam membantu pemenuhan target PAD Kabupaten Gresik.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan. Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
SATPOL pp Kabupaten Gresik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (RP.000)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (RP.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Gresik	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	24.526.732.551,79	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Gresik	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	26,715,206,784.52	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Gresik	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	2 Dokumen	15.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Gresik	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	2 Dokumen	16,500,000.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Gresik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Gresik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16,500,000.00	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Gresik	Jumlah fasilitas administrasi keuangan OPD	12 Bulan	18.376.962.721,79	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Gresik	Jumlah fasilitas administrasi keuangan OPD	12 Bulan	19.781.446.286,49	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Gresik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/Bulan	18.376.962.721,79	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Gresik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/Bulan	19.781.446.286,49	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Gresik		1 Paket	347.575.910,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Gresik		1 Paket	374.141.166,22	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Gresik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	260 Paket	347.575.910,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Gresik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	260 Paket	374.141.166,22	
	Administrasi Umum Perangkat	Kab.Gresik	Jumlah fasilitas administrasi umum OPD	6 Jenis	1.261.199.920,00	Administrasi Umum Perangkat	Kab.Gresik	Jumlah fasilitas administrasi umum OPD	6 Jenis	1.387.319.912,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Gresik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	55 Paket	35.079.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Gresik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	55 Paket	38.586.900,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	185.754.670,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	204.330.137,00	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1850 Paket	157.986.420,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1850 Paket	173.785.062,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Gresik	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	400 Paket	16.900.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Gresik	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	400 Paket	18.590.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Gresik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	36.018.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Gresik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	39.619.800,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	829.461.830,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	912.408.013,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gresik	Jumlah fasilitas penyediaan jasa penunjang pelayanan OPD	2 Jenis	4,075,994,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gresik	Jumlah fasilitas penyediaan jasa penunjang pelayanan OPD	2 Jenis	4.210.000.000,00	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	200,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	210,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	126 Laporan	3,875,994,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	126 Laporan	4.000.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gresik	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas	1 Tahun	450.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gresik	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas	1 Tahun	650,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab.Gresik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	450.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab.Gresik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	650,000,000	

	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab.Gre sik			3.016.111.78 5,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab.Gre sik			4,712,274,082	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gre sik	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	450 Kali	1.096.597.58 5,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gre sik	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	450 Kali	2,185,749,432	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab.Gre sik	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	350 kali	554.831.785, 00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab.Gre sik	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	350 kali	554.831.785,00	

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	550 Kali	108.185.900,00	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	550 Kali	267,901,725	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.Gresik	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	120 Dokumen	101.777.000,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.Gresik	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	120 Dokumen	200.000.000,00	

	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakattermasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab.Gresik	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	85 Orang	331.802.900,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakattermasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab.Gresik	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	85 Orang	700.000.000,00	
	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab.Gresik	Jumlah penegaka pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	500 Kali	1.917.884.000,00	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab.Gresik	Jumlah penegaka pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	500 Kali	2,377,476,750	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	10 Laporan	564.648.500,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	10 Laporan	655,256,350	

	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	56 laporan	21.642.800,00	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	56 laporan	57,256,200	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	650 Laporan	1.331.592.700,00	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gresik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	650 Laporan	1,664,964,200	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab.Gresik	Jumlah pembinaan PPNS	1 Kali	1.630.200,00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab.Gresik	Jumlah pembinaan PPNS	1 Kali	43,217,200	

	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab.Gresik	jumlah pelaksanaan pelatihan /bintek PPNS di Kab.Gresik	5 Laporan	1.630.200,00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab.Gresik	jumlah pelaksanaan pelatihan /bintek PPNS di Kab.Gresik	5 Laporan	43,217,200	
	TOTAL				27.542.844.336,79	TOTAL				27,715,206,784.52	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi. Usulan dari para stakeholders disampaikan pada saat forum SKPD, dimana program dan kegiatan dari Satpol PP hanya mendapat saran untuk meningkatkan pencapaian kinerja dalam penegakan PERDA, tidak ada usulan program/kegiatan.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Table 2.4 (**Tabel T-C.32**)
Usulan Proram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Gresik
Satuan Polisi Pamong Praja

No .	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, maka penegakan Perda menjadi prioritas utama, sehingga terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah bertugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan aktifitas sehari - hari dengan aman dan tenang.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik merupakan SKPD pendukung dalam misi 1 :

Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berakhlakul Karimah

merealisasikan Misi Satpol PP Kabupaten Gresik, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra

Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.

Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai SKPD, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam mewujudkan Misi ke-1 menetapkan tujuan sebagai berikut :

Untuk mewujudkan Misi Kabupaten Gresik "**Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berakhlakul Karimah** " maka ditetapkan tujuan "**Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia** dan sasaran "**Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya**"

Tujuan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, di mana Satpol PP

berfungsi sebagai penegak peraturan daerah, penjaga ketertiban umum, dan pelindung masyarakat dalam konteks otonomi daerah.

Sasaran (*objective*) merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific* (spesifik), *measureable* (dapat diukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan), *Time Bound* (batas waktu), *continously improve* (perbaikan berkelanjutan). Untuk mencapai tujuan di atas, dirumuskan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

- **Menguatkan Keamanan dan Ketertiban**

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan Dinas SATPOL PP dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah, termasuk penegakan peraturan daerah, pencegahan gangguan keamanan, serta penanggulangan masalah ketertiban masyarakat. Upaya ini mencakup penguatan koordinasi antar instansi terkait, serta pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan penindakan yang efektif.

- **Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat**

Sasaran ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan mendukung program-program yang berkaitan dengan keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing. Dengan meningkatnya partisipasi sosial masyarakat, diharapkan kesadaran dan kepedulian terhadap peraturan dan norma sosial dapat lebih optimal. Ini juga mencakup pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka

dalam menjaga ketertiban, serta mempererat hubungan antara masyarakat dan aparaturnya penegak hukum.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 2 program dan 9 Kegiatan yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 4) Administrasi Umum Perangkat;
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;

3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota.

Lokasi penyebaran Program dan Kegiatan dari Satpol PP Kab. Gresik ini meliputi semua daerah kabupaten Gresik dikarenakan semua kegiatan dari Satpol PP Kab. Gresik ini bersifat rutinitas seperti patroli, pengamanan dan lain-lain.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Table 2.7 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Kab. Gresik		27.542.844.336,79	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27.910.000.000,00
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Kab. Gresik	100 %	24.526.732.551,79	Dana Transfer Umum-Dana		100%	24.380.000.000,00

	KABUPATEN/KOTA					a Alokasi Umum			
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	Kab. Gresik	7 dokumen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 dokumen	20.000.000,00
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	7 DOKUMEN	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 DOKUMEN	20.000.000,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan OPD	Kab. Gresik	12 bulan	18.376.962.721,79	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	18.000.000.000,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik	115 Orang/Bulan	18.376.962.721,79	Dana Transfer Umum-Dana		125 Orang/Bulan	18.000.000.000,00

						a Alokasi Umum			
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gresik	1 Paket	347.575.910,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	400.000.000,00
1.05.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Gresik	260 Paket	347.575.910,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		260 Paket	400.000.000,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah fasilitasi administrasi umum OPD	Kab. Gresik	6 jenis	1.261.199.920,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 jenis	1,930,000,000
1.05.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik	9 Paket	35.079.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		10 Paket	65,000,000

	n Bangunan Kantor					a Alokasi Umum			
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik	62 Paket	185.754.670,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		65 Paket	400.000.000
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik	1500 Paket	157.986.420,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1750 Paket	200.000.000,00
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gresik	11 Paket	16.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Paket	40.000.000,00
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gresik	180 Dokumen	36.018.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		200 Dokumen	40.000.000,00

						a Alokasi Umum			
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik	100 Laporan	829.461.830,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120 Laporan	500.000.000,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas penyediaan jasa penunjang pelayanan OPD	Kab. Gresik	2 jenis	4,075,994,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 jenis	4,250,000,000
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gresik	36 Laporan	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	250,000,000
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik	133 Laporan	3,875,994,000	Dana Transfer Umum-Dana		133 Laporan	4,000,000,000

						a Alokasi Umum			
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas	Kab. Gresik	1 tahun	650,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	500,000,000
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Gresik	44 Unit	450.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		44 Unit	500,000,000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas yang dibina Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis Persentase Anggota Pamong Praja yang dibina Presentase penyelesaian pelanggaran Perda	Kab. Gresik	100 %	3.016.111.785,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	3,250,000,000

1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Gresik	406 kali	1.096.597.585,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		406 kali	1,100,000,000
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Gresik	140 Kasus	554.831.785,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Kasus	80,000,000
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	Kab. Gresik	40 Laporan	108.185.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	120,000,000

	melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan							
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gresik	6 Dokumen	101.777.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	200,000,000
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakattermasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Gresik	775 Orang	331.802.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		850 Orang	700,000,000

1.05.02.2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penegakan pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	Kab. Gresik	400 kali	1.917.884.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		400 kali	2.350.000.000,00
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Kab. Gresik	10 Laporan	564.648.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	600.000.000,00
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Gresik	60 Laporan	21.642.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 Laporan	100,000,000
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab. Gresik	170 Laporan	1.331.592.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		180 Laporan	1,650,000,000

1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan PPNS	Kab. Gresi k	1 kali	1.630.200,00	Dana Transfer Umum-Dan a Alokasi Umum		1 kali	80.000.000,0 0
1.05.02.2.03.00 06	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Gresi k	35 Lapo ran	1.630.200,00	Dana Transfer Umum-Dan a Alokasi Umum		50 Laporan	80.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 2.8, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.8

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKAB. GRESIK

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstra a OPD	Realis asi Capaia n RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasi onal	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						27.542.844 .336,79						27.910.000.00 0,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						27.542.844 .336,79							27.910.000.00 0,00	

	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						27.542.844.336,79							27.910.000.000,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	100%	24.526.732.551,79	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				-	24.380.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	Seluruh Pegawai Satpol PP	-	20.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	00001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Pembangunan	Seluruh Pegawai Satpol PP		20.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

															n infrastruktur tangguh dan berkelanjuta n					
	1	05	01	2.02		Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan OPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	18.376.9 62.721,7 9	Kab. Gresik, Keboma s, Keboma s	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P8 - Penyelengga raan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPemb angunan infrastruktur tangguh dan berkelanjuta n	Seluruh Pegawai Satpol PP	-	18.000.000.00 0,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0 0 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 Orang /bula n	109 Orang /bulan	109 Orang/b ulan	109 Orang/ bulan	18.376.962 .721,79	Kab. Gresik, Keboma s, Keboma s	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P8 - Penyelengga raan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Pembanguna n infrastruktur tangguh dan berkelanjuta n	Seluruh Pegawai Satpol PP		18.000.000.00 0,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas Kepegawaian Perangkat OPD	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	347.575.910,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	Seluruh Pegawai Satpol PP	-	400.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	242 Paket	242 Paket	242 Paket	242 Paket	347.575.910,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	Seluruh Pegawai Satpol PP		400.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1	05	01	2.06		Administra si Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi umum OPD	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	1.261.199. 920,00	Kab. Gresik, Keboma s, Keboma s	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomiPem angunan infrastruktur tangguh dan berkelanjuta n	Seluruh Pegawai Satpol PP	-	1.250.000.000, 00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	25 Paket	35.079.000 ,00	Kab. Gresik, Keboma s, Keboma s	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi Pembanguna n infrastruktur tangguh dan berkelanjuta n	-		70.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	285 Paket	285 Paket	285 Paket	285 Paket	185.754.670,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	Seluruh Pegawai Satpol PP		400.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	00004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13700 Paket	13700 Paket	13700 Paket	13700 Paket	157.986.420,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	Seluruh Pegawai Satpol PP		200.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	00005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				paket Paket	16.900.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPenguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh Pegawai Satpol PP		40.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	00006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	36.018.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh Pegawai Satpol PP		45.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	00009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347 Laporan	347 Laporan	347 Laporan	347 Laporan	829.461.830,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh Pegawai Satpol PP		500.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang pelayanan OPD	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	4,075,994,000	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh Pegawai Satpol PP	-	4.210.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	200,000,000.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh Pegawai Satpol PP		210.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	00004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	133 Laporan	133 Laporan	133 Laporan	133 Laporan	3,875,994,000.00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh Pegawai Satpol PP		4.000.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	450,000,000	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh Pegawai Satpol PP	-	500.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	44 Unit	44 Unit	44 Unit	450,000,000	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh Pegawai Satpol PP		500.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas yang dibina Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis Persentase Anggota Pamong Praja yang dibina Presentase penyelesaian pelanggaran Perda	100%	100%	100%	100%	3.016.111.785,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEBPAKAU (CHT)		P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh warga Gresik	-	3.530.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	450 Kali	450 Kali	450 Kali	450 Kali	1.096.597.585,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh warga Gresik	-	1.100.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

					04															
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	101.777.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh warga Gresik		200.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	625 Orang	625 Orang	625 Orang	625 Orang	331.802.900,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh warga Gresik		700.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan													
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	141 laporan	141 laporan	141 laporan	141 laporan	554.831.785,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh warga Gresik		80.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa													
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	108.185.900,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis	Seluruh warga Gresik		120.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

							dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan								kearifan Gresik yang agamis					
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wal i Kota	Jumlah penegaka pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	500 Kali	500 Kali	500 Kali	500 Kali	1.917.884.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh warga Gresik	-	2.350.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	564.648.500,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis	Seluruh warga Gresik		600.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

															kearifan Gresik yang agamis				
	1	05	02	2.02	0 0 1 1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	154 Lapor an	154 Lapor an	154 Laporan	154 Lapora n	1.331.592. 700,00	Kab. Gresik, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	P4 - Pembanguna n Infrastruktur Pengembang an Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh warga Gresik		1.650.000.000, 00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0 0 1 2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	67 Lapor an	67 Lapor an	67 Laporan	67 Lapora n	21.642.800 ,00	Kab. Gresik, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembanguna n Infrastruktur Pengembang an Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis	Seluruh warga Gresik		100.000.000,0 0	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

							Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								kearifan Gresik yang agamis					
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota	Jumlah pembinaan PPNS	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1.630.200,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh warga Gresik	-	80.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
						Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	39 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	1.630.200,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Seluruh warga Gresik		80.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

	J U M L A H	27.542.844 .336,79		27.910.000.00 0,00	
--	-------------	-----------------------	--	-----------------------	--

BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
2. Dengan ditetapkannya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini akan dijadikan langkah awal perencanaan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja pembuatan renstra SKPD Satpol PP Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026;

Diharapkan dengan tersusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renja ini.

Gresik, 14 Oktober 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK**



AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740820 199412 1 001